

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi, dimana semua pemimpin baik Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati, dipilih dengan cara pemungutan suara. Tidak hanya pemimpin Negara ataupun pemimpin Provinsi, akan tetapi pemimpin kepala desa pun juga dilakukakn secara sistem demokrasi atau bisa di sebut dengan pemilu (Kustiawan, Ramadhani, Damanik, & Muharramsyah, 2022). Pilkada Kabupaten Sumenep salah satu penerapan sistem demokrasi yang dilakukan setiap daerah atau kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Oleh karena itu Kabupaten Sumenep melaksanakan pemilihan kepala daerah atau bupati untuk menerapkan sistem demokrasi yang digunakan oleh Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dalam rangka menyelenggarakan pemilihan calon kepala daerah/pemimpin daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat/rakyat yang dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota. Pemimpin daerah dan wakil pemimpin daerah untuk provinsi adalah gubernur dan wakil gubernur, untuk kabupaten/kota adalah bupati dan wakil bupati. Dalam proses dilaksanakannya Pilkada di Indonesia terkhusus Kabupaten Sumenep masih banyak kekurangan ataupun kecurangan. Akan tetapi yang melakukan kecurangan-kecurangan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab dan hanya ingin memenangkan salah satu paslon. Maka dari itu kerentanan proses Pilkada di Kabupaten Sumenep tindak kecurangannya sangat tinggi, hal ini terjadi karena hasil perolehan suara yang merupakan indikator utama dalam proses pelaksanaan Pilkada dimanipulasi (Sari, Kesuma, & Rifai, 2021).

Pilkada yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pilkada Kabupaten Sumenep. Namun yang menjadi bahasan paling utama pada penelitian ini, yakni strategi komunikasi politik calon bupati dan wakil bupati Sumenep pada masyarakat umum secara keseluruhan dalam mendongkrak suara

calon sangat dibutuhkan terkhusus di Pilkada Kabupaten Sumenep (Umum, 2023).

Tabel 1.1
Data Pemilih Per Kabupaten

Nama Provinsi	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Total Penetapan Pemilih DPT		
				Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Jawa Timur	Bangkalan	18	281	395.390	418.976	814.366
Jawa Timur	Sampang	14	186	372.726	388.695	761.421
Jawa Timur	Pamekasan	13	189	326.779	349.529	676.308
Jawa Timur	Sumenep	27	334	414.340	462.795	877.135

Sumber: Komisi Pemilihan Umum, 2024

Tabel diatas menunjukkan adanya karakteristik yang berbeda pada tiap Kabupaten di Madura, sehingga hasil perolehan pemilihan tidak sama. Sebagaimana Kabupaten Bangkalan karakteristik pemilih, dimana strategi yang diterapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan dengan melakukan serangan fajar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kabupaten Bangkalan 2024 termasuk juga ada permainan secara universal adanya dugaan *money politic* serta pihak KPU ada ketidaknetralan. Kabupaten Sampang strategi yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati dengan pendistribusian formulir yang disertai dengan pemberian tawaran kepada pemilih untuk memilih pasangan tertentu dan juga yang diterapkan adanya bantuan sosial,

Kabupaten Pamekasan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan menerapkan demokrasi dengan menyambung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, lainnya Kabupaten Sumenep strategi komunikasi politik yang diterapkan dengan strategi turun langsung ke masyarakat serta selalu melakukan komunikasi dengan masyarakat bawah, sehingga nilai kepercayaan publik dapat melekat.

Pilkada di Kabupaten Sumenep menjadi kontestasi lima tahunan bagi masyarakat dan para partai politik di Kabupaten Sumenep. Ini sebagai

penerapan strategi komunikasi politik para calon Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Sumenep yang akan menjalankan amanat masyarakat di pemerintahan kabupaten Sumenep selama lima tahun kedepan. Kontestasi ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang di percayai mampu memangku tugas dan tanggung jawab masyarakat demi menciptakan kesejahteraan dan meminimalisir tingkat kemiskinan di kabupaten Sumenep.

Tabel 1.2
Data Pemilihan Kabupaten Sumenep

No.	KECAMATAN	15-19 TH	20-24 TH	TOTAL
1	KOTA SUMENEP	6,09	6,07	
2	KALIANGET	3,063	3,503	
3	MANDING	1,852	2,044	
4	TALANGO	2,344	2,497	
5	BLUTO	3,369	3,567	
6	SARONGGI	2,527	2,812	
7	LENTENG	4,041	4,434	
8	GILIGINTING	1,62	1,857	
9	GULUK-GULUK	3,432	3,472	
10	GANDING	2,23	2,438	
11	PRAGAAN	4,811	4,975	
12	AMBUNTEN	2,686	2,835	
13	PASONGSONGAN	3,545	3,542	
14	DASUK	1,952	1,978	
15	RUBARU	2,508	2,666	
16	BATANG BATANG	3,433	3,86	
17	BATUPUTIH	2,551	2,601	
18	DUNGKEK	1,916	2,258	
19	GAPURA	2,299	2,609	
20	GAYAM	1,623	1,825	
21	NONGGUNONG	754	758	
22	RA'AS	2,381	2,646	
23	MASALEMBU	1,947	2,068	
24	ARJASA	5,704	6,174	

25	SAPEKEN	4,856	4,825	
26	BATUAN	984	1,047	
27	KANGAYAN	1,582	2,101	
JUMLAH		76,1	81,462	157,562

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, 2024

Dalam menghadapi Pilkada 2024, calon Bupati dan Wakil Bupati perlu menyusun strategi komunikasi politik untuk mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat. Strategi komunikasi politik yang efektif tidak hanya mendongkrak suara calon bupati, tetapi juga dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat umum, karena masyarakat secara umum dalam politik dapat memberikan dampak positif bagi calon bupati dan proses demokrasi, seperti peningkatan partisipasi pemilih dan penguatan demokrasi di Sumenep. Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pendekatan yang inovatif dan kreatif dalam menyampaikan pesan politik.

Branding politik dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Sumenep perlu memainkan peran yang menarik, karena branding politik sebagian dari aktivitas persuasi. Kampanye mengemas pesan politik secara intensif dan masif dalam jangka waktu tertentu yang dibatasi, guna mendapatkan kepercayaan publik dalam mendongkrak popularitas pilkada, dengan mendokrak suatu popularitas pilkada yakni membutuhkan strategi komunikasi politik dalam berbagai kegiatan yang menggunakan berbagai teori untuk mempengaruhi khalayak luas dengan cara-cara yang dapat diukur. Dalam komunikasi politik juga merujuk pada *public speaking* berperan penting dalam berbagai bidang kehidupan kita, misalnya dalam bidang pendidikan, profesional, politik, dan lain sebagainya (Srisadono, 2018).

Publik speaking menjadi landasan dalam mempengaruhi khalayak dengan memframing diri bagi setiap aktor, baik aktor dalam pendidikan, bisnis, ekonomi, politik, dan sebagainya. Aktor politik sangat diutamakan untuk mengenalkan dirinya terhadap publik, sehingga peran publik speaking menjadi suatu keutamaan bagi setiap aktor untuk membangun suatu kepercayaan terhadap masyarakat. Akan tetapi masyarakat saat ini bukan melihat dari aspek speakingnya yang dijadikan sebagai daya tarik atau peminat terhadap suatu

aktor, tetapi melihat bagaimana aktor tersebut menghidupkan atau menghibur suasana maupun membangun masyarakat.

Salah satu fenomena yang menjadi bahan diskusi dalam menjelang pilkada 2024 di Kabupaten Sumenep yakni, semakin kuatnya media sosial dalam menampilkan para kandidat politik untuk prosesi kontestasi demokrasi pilkada tahun 2024. Dilansir dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengumumkan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Dari hasil survei penetrasi internet Indonesia 2024 yang dirilis APJII, maka tingkat penetrasi internet Indonesia menyentuh angka 79,5%. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka ada peningkatan 1,4% (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2024).

Politik menjadi korelasi paling efektif dalam mendistribusikan sumber manusia bagi partai politik. Di karenakan dalam berbagai hubungan politik menciptakan korelasi yang baik dan buruk, tergantung pada diplomasi politik suatu partai politiknya masing-masing. Dengan memahami suatu korelasi politik meminimalisir asumsi yang keliru dalam menciptakan determinasi politik di pilkada 2024 di Kabupaten Sumenep.

Pilkada menjadi salah satu pilar demokrasi yang esensial dalam kehidupan bidang politik di Kabupaten Sumenep. Pilkada tahun 2024 menjadi momentum terpenting bagi semua partai politik dalam menarik perhatian pemilih.

Secara keseluruhan, pentingnya strategi komunikasi politik dalam mengakomodir basis massa dalam Pilkada Sumenep tidak dapat diabaikan terutama pada masyarakat kelas bawah. Melalui pendekatan yang tepat dan inovatif, calon bupati dapat membangun hubungan yang lebih baik sehingga menciptakan iklim politik yang lebih dinamis dan responsif. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang baik bagi pengembangan strategi komunikasi politik di Kabupaten Sumenep kedepan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang ingin diteliti yaitu : Bagaimana strategi komunikasi politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam memenangkan Pilkada Sumenep 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah mengetahui tentang strategi komunikasi politik apa yang digunakan oleh pasangan Bupati terpilih Kabupaten Sumenep dalam memenangkan Pilkada Sumenep 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dilakukan sebagai pandangan yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu komunikasi terkhusus pada strategi komunikasi politik Bupati dan Wakil Bupati dalam memenangkan Pilkada 2024 serta sebagai pengembangan penelitian berikutnya.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan keilmuan yang merujuk pada masalah/fenomena tentang komunikasi politik pemilu di Indonesia.
3. Penelitian ini sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan strategi komunikasi politik dan pesan politik yang disampaikan oleh bupati dan wakil bupati berikutnya, serta menjadikan bahan kajian lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini menambah wawasan mengenai uraian tentang strategi komunikasi politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam memenangkan Pilkada.
2. Penelitian ini dilakukan agar dapat dijadikan sebagai masukan secara ilmiah tentang strategi komunikasi politik.
3. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman mengenai uraian tentang perencanaan pesan politik yang

disampaikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih berdasarkan bingkai strategi komunikasi politik